

ANALISIS KEMANDIRIAN DAERAH DAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Elly Karmeli¹, Wahyu Haryadi^{2*}, Muslimin³
¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: wahyu.haryadi82@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 21 Februari 2022 Revised: 05 April 2022 Published: 30 April 2022	<i>This research aims to analyze regional autonomy and degree of fiscal decentralization of Sumbawa District in 2015-2019. This type of research is descriptive research, which is a research that aims to determine the value of the independent variable, without connecting or making comparisons with other variables. The quantitative data used was obtained from secondary sources by collecting documents that already exist in the form of target data and the realization of regional revenue and expenditure budget of Sumbawa District in 2015-2019. Data analysis was performed using financial ratio analysis techniques. These research findings indicate that the region autonomy and degree of fiscal decentralization of Sumbawa District in 2015-2019 is still very low. The average percentage in 2015-2019 is 17.02 % or having instructive relationship patterns, while the ratio of fiscal decentralization of Sumbawa District in 2015-2019 is 10.67 % or fell in the low category. This condition illustrates that Sumbawa District rely heavily on the income that comes from outside regional revenue, such as balancing funds and other legitimate income.</i>
Keywords Regional Autonomy; Degree of Fiscal Decentralization.	

PENDAHULUAN

Kewenangan Daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri telah bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Lahirnya kebijakan otonomi daerah yang diikuti oleh kebijakan kebijakan lainnya yang turut mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, harapannya daerah mampu untuk mengembangkan diri sehingga tercipta suatu pola kemandirian daerah yang selain memajukan daerah itu sendiri sekaligus mampu mensejahterahkan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan menurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran.

Menurut Ebel dan Yilmaz (2002) pada prinsipnya ada 3 bentuk desentralisasi dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah. Mengingat prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan otonomi daerah maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari desentralisasi devolusi, yaitu penyerahan fungsi-fungsi pemerintah pusat pada pemerintah daerah di mana daerah juga diberikan kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal ini adalah agar daerah yang mampu memperkecil tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Mengingat pelaksanaan program pembangunan daerah di berbagai bidang membutuhkan biaya yang sangat besar, maka daerah harus dapat mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi untuk membangun kemandirian dalam pembiayaan belanja daerah. Kemandirian daerah didefinisikan sebagai seberapa besarkah tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai daerahnya (Nurcholis, 2007).

Perkembangan kreatifitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Menurut Bastian (2006), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Jadi kinerja keuangan adalah hasil-hasil keuangan yang telah dicapai atau prestasi keuangan yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam periode waktu tertentu

Menurut Noor (2017), analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Adapun manfaat dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah adalah dalam mengukur kinerja daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dipergunakan sebagai acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan juga pendapatan daerahnya pada periode-periode selanjutnya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan telah digunakan secara luas dan diterapkan dalam mengukur kinerja daerah tersebut (Sumarjo, 2010).

Secara garis besar kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang penulis gunakan dalam rasio keuangan akan memberikan manfaat untuk

mengetahui informasi terhadap kemandirian daerah Kabupaten Sumbawa. Mengetahui tingkat penggunaan biaya yang digunakan secara efisien, tingkat efektivitas dalam hal sejauhmana Pemda Kabupaten Sumbawa menjalankan program atau kegiatan sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki, selain itu mengetahui informasi terhadap besarnya dana yang dialokasikan sehingga akan sangat membantu pada ekonomi masyarakat serta mengetahui keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kondisi laporan keuangan yang apabila digunakan dengan analisis rasio keuangan akan sangat bermanfaat untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas public dalam rangka menciptakan *good govermance*, jika laporan keuangan dipublikasi dan ditelaah secara kritis maka pembaca laporan keuangan akan dapat menangkap berbagai informasi penting didalamnya.

Dengan menggunakan rasio keuangan sebagai cermin dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa akan sangat membantu dalam mengambil keputusan terhadap informasi-informasi yang terdapat dari hasil analisis laporan keuangan. Informasi-informasi yang berkualitas dari rasio keuangan yang penulis gunakan akan sangat membantu dalam memberikan dan memprediksikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

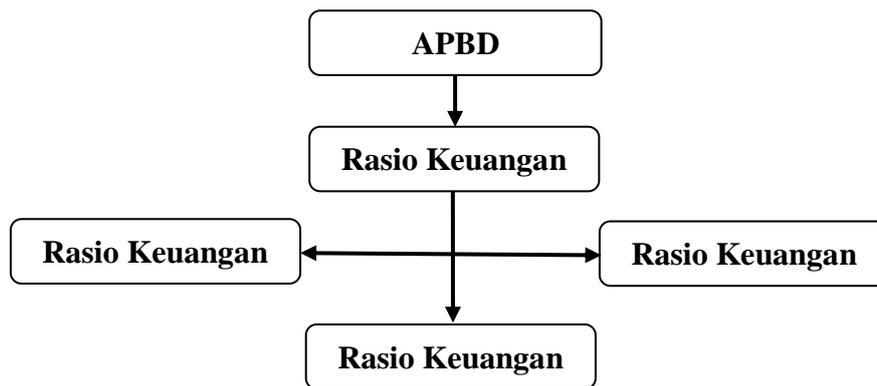
Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah (Mardiasmo, 2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus selalu berupaya nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat memenuhi kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing masing daerah serta dapat memenuhi tuntunan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas public. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik sehingga baik tujuan maupun sasaran akan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang diukur menggunakan rasio keuangan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2018). Penelitian deskriptif kuantitatif yang peneliti gunakan adalah untuk mengetahui kinerja APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2019 dengan menggunakan rasio keuangan daerah.



Gambar 1. Desain Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka serta dapat pula dinyatakan dalam satuan hitung (Sugiyono, 2017). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2014) sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Adapun data yang diambil bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Margono (2007), dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsi-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2019.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan. Adapun analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Rasio Kemandirian dan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio keuangan yang digunakan untuk membantu dalam memberikan dan memprediksikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ daerah}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Tabel 1. Presentase Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase Radio Kemandirian (%)	Kriteria Radio Kemandirian	Pola Hubungan
0 - 25	Rendah Sekali	Instruktif
26 - 50	Rendah	Konsultatif
51 - 75	Sedang	Partisipatif
76 - 100	Tinggi	Delegatif

Sumber : Edy Sumantri, 2004.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Desentralisasi fiskal ini adalah agar daerah yang mampu memperkecil tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Presentase Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Cukup
30,01% - 40%	Sedang
40,01% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Hasannudin, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

1. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerahnya dari kemampuan sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Data Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Dana Perimbangan	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria Rasio
2015	136,672,898,733.61	916,583,889,182.00	253,856,336,114.79	11,67	Intruktif
2016	135,092,854,266.71	1.204.288.145,86	2,266,198,600.00	46,99	Konsultatif
2017	249,526,156,524.27	1.204.288.145,86	53,329,376,508.00	4,57	Intruktif
2018	143,943,921,430.24	1.194.041.315.627,00	59,008,578,044.00	11,48	Intruktif
2019	163,793,011,423.91	1,314,892,538,873.00	104,003,836,788.43	11,54	Intruktif

Sumber: Data Sekunder (diolah).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2015, rasio kemandirian keuangan daerah 11,67%. Di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 46,99%, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya realisasi dana perimbangan sebesar 1.204.288.145,86 dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,266,198,600.00 di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,57%, tahun 2018 meningkat lagi menjadi 11,48% dan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 11,54%. Hal ini disebabkan meningkatnya dana perimbangan dan lain-lain pendapatab daerah yang sah.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019

Derajat desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam melaksanakan otonomi daerah. Kebijakan desentrasasi fiskal ini adalah agar daerah yang mampu memperkecil tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Hasil perhitungan rasio desentrasasi fiskal daerah kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Data Desentrasasi Fiskal Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Rasio
2015	136,672,898,733.61	1,307,113,124,030.40	10,45	Kurang
2016	135,092,854,266.71	1,526,355,151,256.80	8,85	Sangat Kurang
2017	249,526,156,524.27	1,675,057,372,641.27	14,89	Kurang
2018	143,943,921,430.24	1,604,617,445,655.24	8,97	Sangat Kurang
2019	163,793,011,423.91	1,782,120,347,895.91	9,19	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder (diolah).

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa derajat desentralisasi fiskal tahun 2015-2019 adalah tahun 2015 rasio derajat desentralisasi fiskal menjadi 10,45%, ditahun 2016 menurun 8,85% hal ini disebabab oleh menurunnya realisasi pendapatan asli daerah 135,092,854,266.71 meskipun realisasi pendapatan daerah sebesar Rp., 1,526,355,151,256.80 ditahun 2017 meningkat realisasi pendapatan daerah 249,526,156,524.27 serta rasio derajat desentralisasi fiskal 14,89%, di tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah 143,943,921,430.24 menurun 8,97 dan di tahun 2019 meningkat menjadi 9,19%.

Pembahasan

Kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal daerah menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Sumbawa periode 2015-2019 masih tergolong rendah sekali atau memiliki pola sifat instruktif, yaitu sebesar 17,02%. Hal ini berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerahnya dari kemampuan sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi daerah sehingga berpengaruh terhadap rendahnya PAD sehingga dengan hasil ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian daerah kabupaten Sumbawa belum mampu secara optimal dalam melaksanakan otonomi daerah. Pentingnya peningkatan rasio kemandirian daerah pada suatu daerah dalam melihat kemampuan daerah dalam mengelola otonomi daerah diperjelas oleh Teori Halim (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Hasil Penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pupung Puad Hasan (2014) tentang Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Jawa Barat 2008-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Daerah di Kota Jawa Barat 2008-2013 berada di kategori sangat kurang dan kemampuan keuangan daerah masih kurang. Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja rutin berada dibawah 40%.

Sedangkan derajat desentralisasi fiskal secara rata-rata adalah sebesar 10,67 berada pada kategori kurang. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten Sumbawa harus lebih mengoptimalkan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian fiskal secara lebih efektif. Dengan meningkatnya desentralisasi fiskal akan meningkatkan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah kabupaten Sumbawa dan memperoleh transfer dari pusat. Sangat kurangnya derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Sumbawa masih sangat bergantung kepada penerimaan yang bersumber dari luar PAD seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Mardiasmo (2016), derajat desentralisasi fiskal atau kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam melaksanakan otonomi daerah secara keseluruhan karena selain bermanfaat untuk mendorong dan meningkatkan kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga akan akan memperbaiki alokasi sumber daya produktif sehingga mampu melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi *et al.* (2013) tentang Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rata rata desentralisasi fiskal PAD adalah 9,25% kondisi ini menggambarkan bahwa DDF sangat kurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2019 masih tergolong rendah sekali atau memiliki pola sifat instruktif, yaitu sebesar 17,02%. Hal ini berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Derajat desentralisasi fiskal secara rata-rata adalah sebesar 10,67 berada pada kategori kurang. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten Sumbawa harus lebih mengoptimalkan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian fiskal secara lebih efektif.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran berdasarkan pengelolaan keuangan daerah yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa hendaknya dapat meningkatkan intensifikasi sumber-sumber pendapatan lainnya dibarengi dengan penerbitan dan kedisiplinan masyarakat dalam berpartisipasi melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan iklim perekonomian daerah sehingga dapat mendorong investasi menuju daerah menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, I. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ebel, R D. dan Serdar Y. 2002. On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization. *World Bank Study, Policy Research Working Paper*. No. 2809.
- Halim. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan. 2014. Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja*. Vol. 17 (2): 20-40.
- Hasanuddin & Wokas, H.R.N. 2014. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara. *Journal of Accountability*. Vol 3 (1): 1-10.
- Indriantoro, N. & Supomo, B. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen (Cetakan Ke-12)*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Margono, S. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Noor, M. 2017. Inovasi dan Orientasi Baru Otonomi Daerah. *Mimbar Administrasi*. Vol. 1 (1): 15-21.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Supriyadi, Armandelis & Rahmadi, S. 2013. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 1 (1): 1-10.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.